



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT  
AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Makati, Philipina, pada tanggal 7 Oktober 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT  
AREA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

AREA ( KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN  
INVESTASI ASEAN).

#### Pasal 1

Mengesahkan Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Makati, Philipina pada tanggal 7 Oktober 1998, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasan Inggris.

#### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 40